

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **VI.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka pelaksanaan *collaborative governance* dalam upaya penanganan TKI Bermasalah di Kota Tanjungpinang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Struktur jaringan yang dibentuk dalam kolaborasi penanganan TKI Bermasalah tidak membentuk hirarki dan bersifat horizontal antar instansi dan pemangku kepentingan yang lainnya. Hal ini dapat dilihat berdasarkan kesepemahaman bersama akan tugas dan fungsi masing-masing instansi dan penguatan sinergitas antar pemangku kepentingan.
2. Komitmen terhadap tujuan kolaborasi antar para pemangku kepentingan masih sangat lemah. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya tujuan bersama yang dihasilkan oleh para pemangku kepentingan dalam penanganan TKI Bermasalah, hanya ada tujuan masing-masing dari para pemangku kepentingan.
3. Kepercayaan antar pemangku kepentingan yang tergabung dalam Tim Satgas telah berjalan baik. Hal ini dilihat dari pendelegasian tugas yang teratur dalam Tim Satgas. Namun sebaliknya, kepercayaan antar instansi lain di luar Tim Satgas masih kurang baik, karena masih mempermasalahkan tumpang tindih kewenangan.
4. Dari aspek *governance* dalam kolaborasi yang dilakukan, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari partisipasi, seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan TKI Bermasalah ikut turut berpartisipasi secara aktif dengan terlibat dalam setiap pertemuan.
  - b. Sementara dilihat dari transparansi sudah berjalan cukup baik, dilihat dari akses data yang diberikan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Namun hal ini kurang dimaksimalkan oleh para pemangku kepentingan untuk kemudahan penanganan.
  - c. Kemudian akuntabilitas yang dibangun hanya sebatas akuntabilitas kepada masing-masing instansi. Hanya Tim Satgas yang memiliki pertanggungjawaban yang bersifat kolaboratif.
5. Akses terhadap kekuasaan dalam kolaborasi penanganan TKI Bermasalah masih sangat lemah. Hal ini dikarenakan belum ada aturan bersama dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang dibuat oleh pemangku kepentingan, sehingga selama ini mereka bertindak sesuai dengan peraturan dan SOP instansi masing-masing.
  6. Pembagian akuntabilitas antar pemangku kepentingan telah dilakukan sesuai dengan tugas masing-masing pemangku kepentingan. Namun hal ini bukan hasil dari kesepakatan bersama para pemangku kepentingan, melainkan pembagian tugas sesuai dengan peran instansi masing-masing.
  7. Berbagi informasi antar pemangku kepentingan belum memberikan kemudahan akses bagi para pemangku kepentingan. Kemudahan akses hanya dibentuk oleh alur koordinasi antar instansi yang tergabung dalam Tim Satgas. Sementara itu untuk pemangku kepentingan di luar Tim Satgas, koordinasi yang diciptakan

kurang berjalan efektif. Hal ini dikarenakan tidak adanya alur komunikasi yang dibangun antar Tim Satgas dan pemangku kepentingan yang lain.

8. Akses terhadap sumber daya dalam kolaborasi penanganan TKI Bermasalah diperoleh hasil sebagai berikut:
  - a. Sumber daya manusia yang terlibat dalam penanganan TKI Bermasalah masih kurang dan terbatas, khususnya sumber daya di Rumah Penampungan WNI-M KPO.
  - b. Sumber daya finansial yang digunakan dalam penanganan TKI Bermasalah berasal dari APBN dan APBD.
  - c. Sumber daya sarana dan prasarana yang digunakan dalam penanganan TKI Bermasalah masih kurang memadai, khususnya sarana dan prasarana yang terdapat di Rumah Penampungan WNI-M KPO.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwasanya pelaksanaan *collaborative governance* dalam penanganan TKI Bermasalah di Kota Tanjungpinang belum berjalan baik. Dari analisis terhadap variabel yang digunakan untuk mengukur *collaborative governance* hanya variabel struktur jaringan, governance dan pembagian akuntabilitas yang sudah berjalan baik. Namun dinilai dari hal komitmen terhadap tujuan, kepercayaan antar *stakeholders*, akses terhadap kekuasaan, berbagi informasi dan akses terhadap sumber daya masih belum berjalan baik.

## VI.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka untuk dapat meningkatkan kolaborasi dalam konsep *collaborative governance* yang dilakukan pemerintah dalam upaya penanganan TKI Bermasalah di Kota Tanjungpinang, ada beberapa saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Mengingat bentuk struktur jaringan yang sudah berjalan baik, maka pemerintah seharusnya perlu melibatkan pihak swasta dan kelompok masyarakat secara menyeluruh, sehingga kolaborasi yang dilakukan tidak hanya melibatkan antar instansi namun juga seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.
2. Perlunya membuat tujuan bersama dalam penanganan TKI Bermasalah, sehingga dapat meningkatkan komitmen antar para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan.
3. Perlunya membangun komunikasi dan meredam ego sektoral antar instansi yang terlibat dalam penanganan TKI Bermasalah, sehingga dapat menimbulkan rasa saling percaya terhadap seluruh pemangku kepentingan.
4. Perlu inisiatif bersama dari seluruh pemangku kepentingan untuk membuat aturan bersama dan SOP penanganan TKI Bermasalah. Yang mana hal tersebut dapat dibuat bersama seluruh pemangku kepentingan berdasarkan proses penanganan di lapangan, sehingga ada peraturan dan SOP yang bersifat baku yang dapat digunakan dalam penanganan di lapangan.
5. Perlunya membuat alur komunikasi dan koordinasi untuk berbagi informasi terhadap seluruh pemangku kepentingan, agar informasi yang diperoleh seluruh pemangku kepentingan sama, tidak hanya bagi Tim Satgas saja.

6. Perlu adanya penyesuaian jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang dilibatkan di lapangan. Anggota Tim Satgas hendaknya dikurangi, karena sudah ada petugas PPD yang ikut membantu di lapangan, sehingga perlu dipertimbangkan agar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Sementara itu perlu penambahan sumber daya manusia yang berkualitas di Rumah Penampungan WNI-M KPO untuk menangani TKI selama berada di penampungan.
7. Perlu peningkatan fasilitas sarana dan prasarana, khususnya terhadap sarana dan prasarana yang ada di Rumah Penampungan WNI-M KPO. Hal ini diperlukan agar dapat memberikan rasa nyaman dan keterlindungan bagi para TKI selama berada di penampungan.